ABSTRAK

Judul Laporan Akhir ini adalah “PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU”. DIdasari oleh pelaksanaan pemerintah dalam era otonomi daerah pada saat sekarang ini lebih menekankan pada prinsip demokrasi, peran serta masyarakat dalam proses pembangunan di negara ini harus lebih dominan. Keikutsertaan serta dukungan masyarakat merupakan salah satu keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan proses pembangunan.salah satu contoh pelaksanaan perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif adalah Musrenbang. Secara keseluruhan tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kota Tanjungpinang, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat didalam proses perencanaan pembangunan.

Di dalam menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan yang terbagi dalam observasi, wawancara dan dokumentasi serta dengan melakukan studi pustaka yang diharapkan agar dapat memenuhi data-data yang dirasa masih kurang lengkap pada proses penelitian di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan merupakan reduksi data, tampilan data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil pengamatan, proses perencanaan pembangunan partisipatif di kota Tanjungpinang masih dikatakan belum secara maksimal dilaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan karena ketidakpahaman masyarakat terhadap pentingnya perencanaan pembangunan di daerah.

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif adalah kurangnya keterwakilan masyarakat, kurangnya pendampingan dari fasilitator, perbedaan kepentingan, kurangnya transparansi pelaksanaan Musrenbang serta permasalahan anggaran.

Adapun saran untuk meningkatkan pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif yaitu 1. Perlu adanya perbaikan-perbaikan mulai dari pelaksanaan pra musrenbang sampai pasca musrenbang 2. Perlunya dibuat peraturan walikota dalam menetapkan presentase usulan musrenbang yang masuk kedalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Kata Kunci : Perencanaan Pembangunan Partisipatif